

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al Quran.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.
- Adjie, Habib. *Telaah: Perjanjian Perkawinan (Pemisahan Harta Mutlak) Yang Dibuat Sebelum dan Sesudah Perkawinan Dilakukan (Dengan Contoh Aktanya)*. Bandung: CV Sadari, 2021.
- Al Maraghi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maragh*. Semarang: Toha, 1986.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amalia, Nanda. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press, 2013.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Asser-Ruiter-Molmaker. *Handleiding Tot Beoefening Van Het Nederlands Burgerlijk Recht*. Zwolle: TjeenkWillink, 1976.
- Asshiddiqie, Jimly. *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru van Hoeve, 1994.
- _____, dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekertaris Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konsitusi RI, 2006.
- Asyhadie, Zaeni, et. al. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Az, Lukman Santoso. *Aspek Hkum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Basuki, Zulfa Djoko. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.
- Beilharz, Peter. *Teori-Teori Sosial, Observasi Kritis terhadap Para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1982.
- C.S.T. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Darmabrata, Wahyono. *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Rizkita, 2002.
- _____. *Hukum Perkawinan Perdata: Syarat Sahnya Perkawinan Hak dan Kewajiban Suami Istri Harta Benda Perkawinan, Jilid I*.
- _____. *Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-Undang Dan Peraturan Pelaksanaannya*. Jakarta: Rizkita, 2008.
- Darmodihardjo, Darji, et. al. *Santiaji Pancasila*. Surabaya: Usaha Nasional, 1979.
- Djaja, Benny. *Perjanjian Kawin: Sebelum, Saat, dan Sepanjang Perkawinan*. Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Djamali, Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2019.
- E. Utrecht. *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Ichtar Baru, 1983.

- Erwin, Muhammad. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.
- H.A. Damanhuri H.R. *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990.
- _____. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, 1990.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan*. Bandung: Eresca, 2010.
- Hariri, Wawan. *Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Prikatan Dalam Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hazairin. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, In Memoriam Prof. Mr. DR. Hazairin*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- _____. *Tinjauan Mengani Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: Tinta Mas, 1986.
- Hujibers, Theo. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius, 1995.
- Ibrahim, Johnny. *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Indrawan, Rully, dan Poppy Yuniawati. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Isnaeni, Moch. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2016.
- J. Satrio. *Hukum Harta Kekayaan*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.
- _____. *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1997.
- _____. *Hukum Perjanjian (Perjanjian Pada Umumnya)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992.
- Judiasih, Sonny Dewi. *Harta Benda Perkawinan*. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- _____. *et. al. Perjanjian Kawin setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015*. Bandung: Cakra, 2018.
- Junaidi, Dedi. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Alumni, 1991.
- Kenedi, John. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [Burgerlijk Wetboek]*. Diterjemahkan oleh Soedharyo Soimin. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Kolkman, W.D., *et. al. Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- Kusuma, Mahmud. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*. Yogyakarta: AntonyLib, 2009.
- Kusumaatmadja, Mochtar, dan B. Arief Sidharta. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Alumni, 2000.
- L.J. Van Apeldoorn. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2004.
- Malian, Sobirin. *Gagasan Perlunya Konstitusi Baru Pengganti UUD 1945*. Yogyakarta: FH UII Press, 2001.

- Manan, Bagir. *Negara Hukum yang Berkeadilan, Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purnabakti Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.CL.* Bandung: PSKN-HTN FH Universitas Padjadjaran, 2011.
- Martiman. *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab.* Jakarta: Karya Gemilang, Indonesia Legal Center Publishing, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum Perdata Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mulyadi. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2016.
- Nasution, Khorudin. *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer.* Yogyakarta: Academia dan Tazzafa, 2004.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia.* Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Prasetyo, Teguh, dan Arie Purnomosidi. *Membangun Hukum Berdasarkan Pancasila.* Bandung: Nusa Media, 2018.
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia.* Surabaya: Airlangga University Press, 1988.
- _____, dan R. Soebijono Tjitrowinoto. *Pluralisme Dalam Perundang-undangan Perkawinan Di Indonesia.* Surabaya: Airlangga University Press, 1986.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu.* Bandung: Sumur, 1981.
- Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan. *Pedoman Penulisan Disertasi.* Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2021.
- Qamar, Nurul. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan.* Makassar: Pustaka Refleksi Books, 2010.
- R. Setiawan. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan.* Bandung: Binacipta, 1987.
- R. Subekti. *Hukum Perjanjian.* Jakarta: Intermasa, 2005.
- _____. *Pokok-Pokok Hukum Perdata.* Jakarta: Intermasa, 1983.
- Rachman, M. Anwar, et. al. *Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi.* Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Rafiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
- _____. *Membedah Hukum Progresif.* Jakarta: Kompas, 2008.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia.* Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- S., Bondan Gunawan. *Apa Itu Demokrasi.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000.
- Saleh, K. Wantjik. *Hukum Perkawinan 45.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000.
- _____. *Hukum Perkawinan Indonesia.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1980.
- Saleh, Roeslan. *Penjabaran Pancasila dan U.U.D. 45 Dalam Perundang-Undangan.* Jakarta: Aksara Baru, 1979.
- Salim H.S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW).* Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

- Samekto, Adji. *Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*. Jakarta: Konstitusi Press, 2015.
- Schmid, J.J. von. *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*. Jakarta: Pembangunan, 1988.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Sidharta, Arief, Meuwissen. *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*. Bandung: Refika Aditama, 2007.
- Sing, Ko Tjay. *Hukum Perdata Hukum Perorangan Hukum Keluarga*. Semarang: Etikad Baik, 1981.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2010.
- _____, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011.
- Soekarno, *Kepada Bangsa*. Jakarta : Panitia Jiwa Revolusi, 1975.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- _____. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Suadi, Amran. *Filsafat Hukum Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Sudarto. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supriyadi, Dedi, dan Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikriis, 2009.
- Surip, Ngadino, *et. al.*, *Pancasila Dalam Makna dan Aktualisasi*. Yogyakarta: Andi, 2015.
- Syahrani, Riduan. *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Bandung: Alumni, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Thalib, Sayuti. *Hukum Kekeluargaan Indonesia: Berlaku Bagi Umat Islam*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Thohari, A. Ahsin. *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*. Jakarta: Elsam, 2004.
- Thontowi, Jawahir. *Pancasila dalam Perspektif Hukum: Pandangan Terhadap Ancaman "The Lost Generation"*. Yogyakarta: UII Pers, 2016.
- Triwibowo, Darmawan, dan Sugeng Bahagijo. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: Pustaka LP3S Indonesia, 2006.
- Utomo, Laksanto. *Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Wahjono, Padmo. *Sistem Hukum Nasional dalam Negara Hukum Pancasila*. Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Wignjodipoero, Soerojo. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1995.
- Wijayanti, Winda. *Hukum Perkawinan dan Dinamikanya*. Depok: Rajawali Pers, 2021.
- Zakiah. *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lingkar Media, 2015.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang Dasar 1945*.

_____, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, UUD 1945, LN No. 75 Tahun 1959, yang telah diamandemen dengan *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen IV*, UUD 1945 Amandemen IV, LN Nomor 14 Tahun 2006.

_____, *Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk*, UU No. 22 Tahun 1946, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura*, UU No. 32 Tahun 1954, LN No. 98 Tahun 1954, TLN No. 694.

_____, *Undang-Undang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*, UU No. 5 Tahun 1960, LN No. 104 Tahun 1960, TLN No. 2043.

_____, *Undang-Undang Perkawinan*, UU No. 1 Tahun 1974, LN No. 1 Tahun 1974, TLN No. 3019, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, UU No. 16 Tahun 2019, LN No. 186 Tahun 2019, TLN No. 6401.

_____, *Undang-Undang Peradilan Agama*, UU No. 7 Tahun 1989, LN No. 49 Tahun 1989, TLN No. 3400, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 3 Tahun 2006, LN No. 22 Tahun 2006, TLN No. 4611, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*, UU No. 50 Tahun 2009, LN No. 159 Tahun 2009, TLN No. 5078.

_____, *Undang-Undang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, LN No. 165 Tahun 1999, TLN No. 3886.

_____, *Undang-Undang Perlindungan Anak*, UU No. 23 Tahun 2002, LN No. 109 Tahun 2002, TLN No. 4235, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, UU No. 35 Tahun 2014, LN No. 297 Tahun 2014, TLN No. 5606.

_____, *Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.

_____, *Undang-Undang Jabatan Notaris*, UU No. 30 Tahun 2004, LN No. 117 Tahun 2004, TLN No. 4432, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

_____, *Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia*, UU No. 12 Tahun 2006, LN No. 63 Tahun 2006, TLN No. 4634.

_____, *Undang-Undang Administrasi Kependudukan*, UU No. 23 Tahun 2006, LN No. 124 Tahun 2006, TLN No. 4674, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun*

- 2006 *Tentang Administrasi Kependudukan*, UU No. 24 Tahun 2013, LN No. 232 Tahun 2013, TLN No. 5475.
- _____, *Undang-Undang Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga*, UU No. 52 Tahun 2009, LN No. 161 Tahun 2009, TLN No. 5080.
- _____, *Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, sebagaimana telah diubah dengan *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*, UU No. 15 Tahun 2019, LN No. 183 Tahun 2019, TLN No. 6398.
- _____, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, PP No. 9 Tahun 1975, LN No. 12 Tahun 1975, TLN No. 3050.
- _____, *Peraturan Pemerintah Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 10 Tahun 1983, LN No. 13 Tahun 1983, TLN No. 3250.
- _____, *Peraturan Pemerintah Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil*, PP No. 45 Tahun 1990, LN Tahun 1990.
- _____, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan*, PP No. 40 Tahun 2019, LN No. 102 Tahun 2019, TLN No. 6354.
- _____, *Peraturan Menteri Agama Tentang Pencatatan Pernikahan*, Permenag No. 20 Tahun 2019, BN No. 1118 Tahun 2019.
- _____, *Peraturan Walikota Semarang Nomor 2A/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Aturan Daerah No. 2/2008 Tentang Administrasi Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan IV*.
- _____, *Fatwa MUI Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama*
- _____, *Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pencabutan Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Agama, Kepercayaan dan Adat Istiadat Cina*.
- _____, *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*,
- _____, *Surat Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tanggal 28 September 2017 Tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan*,
- _____, *Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.2/5876/DUKCAPIL tanggal 19 Mei 2017 Tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Putusan Nomor 1400/K/Pdt/1986*.
- _____. *Putusan Nomor 585/K/Pdt/2012 jo. Nomor 598/PK/Pdt/2016*.

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.
 _____ . Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015.
 _____ . Putusan Nomor 46/PUU-XIV/2016.
 _____ . Putusan Nomor 22/PUU-XV/2017.
- Belanda. *Nieuw Burgerlijk Wetboek*.
 Inggris, *Matrimonial Causes Act 1973*.
 Malaysia, *Matrimonial Causes Act 1973*.
 _____, *Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984*, UU No. 303 Tahun 1984.
 _____, *The Law Reform (Marriage and Divorce) Act 1976*.

Lain-Lain

- “Asas-Asas Perjanjian”, <http://mh.uma.ac.id/2021/01/asas-asas-perjanjian/>.
- “Bab II”. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/10729/F.BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y..>
- “Bab III Tinjauan Teoritis Tentang Perjanjian Perkawinan Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam”.
<http://repository.uinbanten.ac.id/4817/5/BAB%20III.pdf>.
- “Baligh Perspektif Fiqh”. <https://swararahima.com/2018/08/02/baligh-perspektif-fiqh/>.
- “Mengapa Pancasila Dijadikan Ideologi Bangsa? Ini Penjelasan”.
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/mengapa-pancasila-dijadikan-ideologi-bangsa-ini-penjelasan-1vpy4HHxSmJ/4>.
- “Penyebab Minimnya Pencatatan Perjanjian Kawin” hukumonline.com.
- “Perjanjian Pra Nikah Bagi Pasangan Campuran WNI& WNA”.
<https://indolawforyou.wordpress.com/2012/03/30/perjanjian-pra-nikah-bagi-pasangan-campuran-wni-wna/>.
- Abdullah. “Dinamika Islam di Arab Saudi”. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari*, Vol. 4. No. 1, 2019.
- Ahmad, Taufiq Musaddad bin. “Harta Sepencarian Menurut Perspektif Islam”. Pusat Kewangan dan Ekonomi Islam Ilim, https://e-muamalat.islam.gov.my/images/pdf-bahan-ilmiah/HARTA_SEPENCARIAN_MENURUT_PERSPEKTIF_ISLAM.pdf
- Al Bahjah. “Adakah Pembagian Harta Gono Gini Dalam Islam-Buya Yahya Menjawab” . *Youtube*, diunggah melalui <https://youtu.be/PeSR2R-bdgo> , diakses pada 24 Maret 2022.
- Amsari, Feri. “Satjipto Rahardjo dalam Jagat Ketertiban Hukum Progresif”, <https://m.facebook.com/notes/satjipto-rahardjo/satjipto-rahardjo-dalam-jagat-ketertiban-hukum-progresif/10151052278903414/>.
- Aziz, Ibnu Dawam. “Negara Agama, Negara Sekuler, Negara Atheis dan Negara Pancasila” [Negara Agama, Negara Sekuler, Negara Atheis dan Negara Pancasila](http://Negara%20Agama,%20Negara%20Sekuler,%20Negara%20Atheis%20dan%20Negara%20Pancasila.-Kompasiana.com). - Kompasiana.com.

- Burgerlijk Wetboek Boek 1, Personen- en familierecht. *Huwelijkse voorwaarden kunnen zowel door aanstaande echtgenoten vóór het sluiten van het huwelijk als door echtgenoten tijdens het huwelijk worden gemaakt, Artikel 1:114.* https://wetten.overheid.nl/BWBR0002656/2021-01-01/0#Boek1_Titeldeel8.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini. “Hukum Harta Kekayaan Menurut Sistematisasi KUH Perdatadata dan Perkembangannya”. *Jurnal Hukum*, Vol. 2. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2017.
- Chai, Diana, *Prenuptial Agreements in Malaysia: Your Questions Answered*, <https://ringgitplus.com/en/blog/household-budgeting/prenuptial-agreements-in-malaysia-your-questions-answered.html> , diakses pada tanggal 10 April 2022.
- Christianto, Hwian. “Penafsiran Hukum Progresif Dalam Perkara Pidana”. <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/16170>.
- de Rechtspraak, *Checklist verdelen en verreken Huwelijk voorwaarden*, <https://www.rechtspraak.nl/SiteCollectionDocuments/checklist-verdelen-en-verrekenen-huwelijkse-voorwaarden.pdf>.
- Deepublish. “Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar”. [Purposive Sampling: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Contoh yang Baik dan Benar \(penerbitdeepublish.com\)](https://www.deepublish.com).
- Devita, Irma. “Tiga Bentuk Perjanjian Kawin dan Kaitannya Dengan KDRT”. [TIGA Bentuk Perjanjian Kawin dan Kaitannya Dengan KDRT – Irma Devita – Info Kenotariatan dan Pertanahan](#).
- Dewi Prihandini, Yudiana. “Perlindungan Hukum Terhadap Pihak Ketiga Atas Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Perkawinan”. *Jurnal Lex Renaissance*, No. 2. Vol. 4, 2019.
- Dhikshita, Ida Bagus Gede Putra Agung. “Manifestasi Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Mashab Positivisme di Indonesia”. <https://advokatkonstitusi.com/manifestasi-teori-tujuan-hukum-gustav-radbruch-dan-mashab-positivisme-di-indonesia>.
- DPR-RI. “DPR Tetapkan 40 RUU Prolegnas Prioritas 2022”. [Parlementaria Terkini - Dewan Perwakilan Rakyat \(dpr.go.id\)](https://www.dpr.go.id).
- Fajrin, Alfina. “Indonesia sebagai Negara Hukum” <https://www.kompasiana.com/amp/alfinafajrin/59b80b71941c202012739722/indonesia-sebagai-negara-hukum>
- Fanani, Ahmad Zaenal. “Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim”. *Jurnal Varia Peradilan*, No. 304, 2011.
- Faradz, Haedah. “Tujuan dan Manfaat Perjanjian Perkawinan”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8, No. 3, 2008.
- Ghafur, Jamaludin. “Indonesia Darurat Peraturan Sebuah Opini”. <https://law.uui.ac.id/blog/tag/hukum-eropa-kontinental-civil-law-system/#:~:text=Indonesia%20sebagai%20negara%20yang%20menganut,peraturan%20perundang%2Dundangan%20yang%20berlaku>.
- Hasanah, Sovia. “Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata”. [Konsep Akad Menurut Hukum Islam dan Perjanjian Menurut KUH Perdata - Klinik Hukumonline](#).

- _____. “Pencatatan Perjanjian Kawin Pasangan Perkawinan Campuran”.
<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5cb57766da545/pencatatan-perjanjian-kawinpasangan-perkawinan-campuran/>.
- Hayati, Rina. “4 Jenis Pendekatan Penelitian dan Cirinya”. √ 4 Jenis Pendekatan Penelitian dan Cirinya | PenelitianIlmiah.Com.
- _____. “Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode, dan Contohnya”, √ Pengertian Penelitian Deduktif, Ciri, Metode, dan Contohnya (penelitianilmiah.com).
- Het Juridisch Loket, “Apa yang saya atur dalam perjanjian pranikah?”,
<https://www.juridischloket.nl/familie-en-relatie/relatie/wat-regel-ik-in-huwelijkse-voorwaarden/>.
<http://www.dutchcivillaw.com/civilcodebook01.htm>.
- <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/antara-sunnatullah-dan-syariatullah-oleh-a-mukti-arto-14-10>.
- <https://kalam.sindonews.com/ayat/14/3/ali-imran-ayat-14>.
- <https://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-1/boek1/titel7>.
- <https://www.government.nl/topics/marriage-cohabitation-agreement-registered-partnership/question-and-answer/property-arrangements-marriage-and-registered-partnership>.
- <https://www.inews.id/lifestyle/muslim/hadits-pengertian-fungsi-macam-macam-kedudukan-dalam-islam>.
- <https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/trouwen-samenlevingscontract-en-geregistreerd-partnerschap/vraag-en-antwoord/wat-is-het-verschil-tussen-een-huwelijk-geregistreerd-partnerschap-en-samenlevingscontract>.
- Ihromi, Tapi Omas. “Adat Perkawinan Toraja Sa’dan dan Tempatnya Dalam Hukum Positif Masa Kini”. *Disertasi*. 1978.
- Indosiar Visual Mandiri, “Mamah dan Aa beraksi- Perlukah Perjanjian Pra Nikah?”
<https://youtu.be/FPARI2MHfis>.
- Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI Klinik Hukumonline.
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. “Vatican”.
<https://kemlu.go.id/vatican/id/read/vatican/701/etc-menu>.
- Kementerian Pendidikan Malaysia, Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, Kamus Dewan. <https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=harta+sepencarian>.
- Koo Chin Nam & Cho Law Firm. “Prenuptial Agreement in Malaysia”,
<https://koochinam.com/family/prenuptial-agreement-malaysia/>.
- Krisna PTIK. “Hukum Progresif Sebagai Salah Satu Upaya Untuk Mewujudkan Ilmu Hukum Sebagai Sebenar Ilmu”. <http://krisnaptik.wordpress.com/polri-4/teori/hukum-progresif/>.
- Kristanti, Erlina Sandra. “Status Hukum Terhadap Perkawinan Konghucu Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal*. Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Kusnady, Freddy. “Kedudukan Wanita Kawin Sebagai Pengusaha Dalam Hukum Pajak”. *Disertasi*. 1996.

- Lapian, L. M. Gandhi. "Harmonisasi Hukum Tentang Sahnya Perkawinan Kristen dan Hubungannya dengan Harta Benda Perkawinan: Suatu Penelitian Lapangan di Karondoran Minahasa". *Disertasi*. 1993.
- Lase, Marinus. "Asas Non Retroaktif". *Asas Non Retroaktif - Aksara Hukum*.
- Lawyurp. "Jouw Bron Voor Juridische Knoe How", https://lawyurp.nl/burgerlijk-wetboek/personen-en-familie-recht/wettelijke-gemeenschap-van-goederen/huwelijkse-voorwaarden-in-het-algemeen/#Inleiding_algemene_bepalingen_huwelijkse_voorwaarden.
- Mudjiarhardjo. "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif". <https://www.uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.
- Mustofa, Ali. "Islam, Sekulerisme dan Indonesia". <https://news.detik.com>.
- Nafis, Wildan, dan Noor Rahmad. "Hukum Progresif dan Relevansinya Pada Penalaran Hukum di Indonesia". *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. I, No. 2, 2020.
- Nayara Advocacy. "Keberlakuan Putusan MK tentang Perjanjian Kawin Terhadap Perkawinan WNI". <https://www.hukumonline.com/klinik/a/keberlakuan-putusan-mk-tentang-perjanjian-kawin-terhadap-perkawinan-wni-1t5847e8ddabfea>.
- Ngo Foo Yet. "Pre-Nuptial Agreements in Malaysia", https://www.iafl.com/media/1164/prenuptial_agreements_in_malaysia.pdf.
- Nurchayyo, Arianto. "Konsep Negara Hukum Dalam Perspektif Epistemologi". *Jurnal Konstitusi*, Tahun 2010.
- Nurullisa, Ananda Septya. "Pengaturan Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam, KUHP, dan Peraturan Perundang-Undangan". *Jurnal*. Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2021.
- Pandini, Intan, Azmi Fendri, Suharizal. "Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Dihadapan Notaris Terhadap Kreditur Sebagai Pihak Ketiga", *Jurnal Universitas Andalas*, 2018.
- Partyani, Putu Diah Maharni Partayani, *et.al.* "Penerapan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 69/PUU-XIII/2015 Jo. Pasal 29 Ayat (1) UU Perkawinan Mengenai Pengesahan Akta Perjanjian Perkawinan oleh Notaris di Kota Denpasar". <https://ojs.unud.ac.id>.
- Permana, Fuji E. dan Nashih Nashullah. "Mahfud MD: Indonesia Bukan Negara Agama dan Bukan Sekuler" <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara-/19/01/10/pl49ek320-mahfud-md-indonesia-bukan-negara-agama-dan-bukan-sekuler>.
- Prodeita, Theresia Vita. "Pemahaman dan Pandangan Tentang Sakramen Perkawinan oleh Pasangan Suami-Istri Katolik". *Jurnal Teologi*, 2019.
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusat, 1995.
- Rajamanickam, Ramalinggam, *et.al.* "Prenuptial Agreement: Legal Position in Malaysia", *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*, Vol. 8, No. 4, Desember 2019.
- Rasyid, Abdul. "Gono-Gini Dalam Perspektif Hukum Islam". *Artikel Hukum*, 2003.
- Redaksi Justika. "Manfaat Perjanjian Perkawinan Saat Berumah Tangga". [Manfaat Perjanjian Perkawinan Saat Berumah Tangga \(justika.com\)](http://ManfaatPerjanjianPerkawinanSaatBerumahTangga.justika.com).

- Rohani, Hj. Ab Ghani dan Zuhilmi Paidi. "Malaysia-Indonesia: Pengalaman Hubungan Dua Negara Serumpun", *Seminar on National Resilience, Political Managements and Policies in Malaysia*, halaman 223-226. <https://core.ac.uk/download/pdf/12118565.pdf>.
- Romlah, Siti. "Frase 'Antara Lain' Sebagai Awal Alasan Yang Lain Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase". <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/adalah/article/view/11328>.
- Sampoerna University. "Pendekatan Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran ". [Pendekatan Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran \(sampoernauniversity.ac.id\)/](http://sampoernauniversity.ac.id/).
- Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". *Jurnal Judisia*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016: 412-434).
- Setiawan, Puguh Aji Hari. "Arbitrase Sebagai Sarana Mengukuhkan Budaya Hukum Musyawarah Mufakat (Nilai-Nilai Pancasila) Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis di Indonesia". *Disertasi*. Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2017.
- Shidarta. "Desiderata Hukum". <https://business-law.binus.ac.id/2014/10/24/desiderata-hukum/>.
- Sidik, Muhammad. "Perkawinan Orang Islam Dengan Penghayat Kepercayaan (Studi Penghayat Kepercayaan Sunda Wiwitan di Cigugur, Kuningan, Jawa Barat)". *Jurnal* (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019), halaman 60-61.
- Sinaga, Desimawati. "Implikasi Yuridis Terkait Peran Notaris Dalam Pengesahan Perjanjian Perkawinan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015", *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, P-ISSN:2442-5303. E-ISSN:2549-9874. Volume 6 No. 2, September 2020.
- Syahrir, Sutan. "Hukum Progresif: Pancasila sebagai Bintang Pemandu", <http://www.sthmahmpthm.ac.id/detailpost/hukum-progresif-pancasila-sebagai-bintang-pemandu>.
- Tengku Erwinsyahbana, "Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, halaman 2-3.
- Umar, Nasaruddin. "Studi Hukum Perbandingan Sistem Ketatanegaraan Malaysia dan Indonesia". *Jurnal Tahkim*, Vol.IX, No.2., Desember 2013.
- Utami, Silmi Nurul. "3 Sistem Nilai Pancasila sebagai Ideologi Terbuka". <https://www.kompas.com/skola/read/2021/12/13/133940269/3-sistem-nilai-pancasila-sebagai-ideologi-terbuka>.
- Wawancara dengan Bapak Ida Bhawati Hermawan Tangkas, Tokoh Spiritual, Ketua Pasraman Pinandita Brahma Vidya, Singaraja, Bali, melalui sambungan telepon, tanggal 7 Februari 2022, pukul 18.00 WIB.
- Wawancara dengan Bapak. David K. Gea, Sth, Pendeta Jemaat/Gembala Sidang, Gereja Sahabat Indonesia, Bali, melalui sambungan telepon, tanggal 28 Maret 2022, pukul 16.50 WIB.
- Wawancara dengan Bapak. Pdt Handy Pasetya, Rohaniawan, Kepala Vihara Dharmayana Kuta, Bali, melalui sambungan telepon, tanggal 28 Maret 2022, pukul 17.30 WIB.

- Wawancara dengan Bapak. Profesor Doktor FX. Mudji Sutrisno, SJ, Budayawan Indonesia, Rohaniawan Khatolik, Gereja Khatolik Roma, melalui sambungan telepon tanggal 8 Februari 2022, pukul 13.20 WIB.
- Wawancara dengan Bapak. Romo Alexius Andang L. Binawan, Pemuka Agama Khatolik, Dosen Filsafat Universitas Driyakarya, melalui sambungan telepon, tanggal 8 Februari 2022, pukul 18.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Irma Devita S.H., M.Kn, selaku Praktisi Notaris di Jakarta Utara sekaligus Pembicara-pembicara dalam berbagai seminar dan Nara sumber di hukum online, melalui sambungan telepon, Pada Hari Jumat 15 April 2022, pukul 14:40 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Liza Prihandini, S.H., Mkn, Dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia, selaku Majelis Pengawas Notaris Wilayah Provinsi Banten, di Kemang Village Mall Jakarta Selatan, tanggal 11 Februari 2022, pukul 14:00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Maya Gita Gunadi, Staf Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Belanda, melalui email gunadimaya@gmail.com , pada tanggal 25 Maret 2022.
- Wawancara dengan Wen Shi, Guru Agama, Adi Dharmaja Kusuma, Vihara Dharmayana, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, melalui sambungan telepon, tanggal 28 Maret 2022, pukul 19.00 WIB.
- Witoko, Prasetyo Ade, dan Ambar Budhisulistiyawati. “Penyeludupan Perkawinan Beda Agama di Indonesia”. *Jurnal Pasca Sarjana Hukum UNS*, Vol. VII, No. 2, Juli-Desember 2019.
- Yuvenus, Damian Agata. “Analisis Krisis terhadap Perjanjian Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 14, No. 4, 2017.